

PENDIDIKAN ISLAM BERBASIS MULTIKULTURAL DAN KONSTRUKSI SOSIAL PANCASILA

Moh. Irmawan Jauhari
STAI-Ma'arif Kendal Ngawi
irmawanj@gmail.com

Abstract: *Reformation became so far from the goals. Indonesia having big dream if after Orde Baru, it can be better. In fact, it didn't like that. The sequel of conflict, both vertical and horizontal often occurred in reformation era. The threatening of disintegration, dialectic of epoch, need appropriate responses to overcome. Islamic education base on multicultural invited the muslim Indonesia to further realize that Islam is present with respect for diversity. The social construction of Pancasila is also needed for the identity of Indonesian is not lost and by time. The construction process take time and energy that's not little considering the challenges.*

Keywords: *Multicultural, construction, dialectic.*

PENDAHULUAN

Pasca reformasi, terjadi gegap gempita perubahan yang terlalu melebar. Sehingga bangunan kebhinnekaan yang menjadi modal pokok bangsa-negara Indonesia terancam rusak. Diaspora kebebasan tumpang tindih dengan kekerasan. Tidak bisa dilepaskan dari ingatan kehidupan berbangsa dan bernegara adalah, adanya aksi yang dilakukan oleh beberapa orang yang menggunakan nama reformasi untuk menyerang dan menjarah barang milik etnis Tionghoa. Kerusuhan itu pada satu sisi menciderai semangat reformasi.

Rentetan konflik kemudian menghiasi masa transisi bangsa-negara Indonesia, mulai peristiwa berdarah yang terjadi dalam kurun 1998 – 2000 di Ambon, Maluku. Yakni antara kelompok masyarakat beragama yang melibatkan kelompok Kristen dengan Islam. Konflik Sampit antara suku Madura melawan Dayak sekitar awal 2000. Konflik diantara masyarakat dan rakyat Indonesia meluas dalam berbagai bidang. Bahkan dalam rentang waktu yang hampir bersamaan juga, Timor Timur menghendaki referendum, yang pada akhirnya melepaskan diri dari NKRI. Jalinan Tenun masyarakat (*fabric of society*) kelihatan tercabik-cabik akibat berbagai krisis yang melanda masyarakat.¹

Permasalahan yang ada mengancam persatuan dan kesatuan bangsa. Mengingat dampak daripada konflik sangatlah besar. Tidak hanya materi, namun juga manusia itu sendiri yang terhanyut dalam konflik keagamaan. Meskipun banyak juga konflik

¹ Azyumardi Azra, *Merawat kemajemukan Merawat Indonesia*, (Yogyakarta: Kanisius, cet. 5, 2011), 7.

beragama yang pada awalnya tidak semata problem agama. Ada kepentingan-kepentingan lain yang bersembunyi di balik konflik tersebut.²

Wajah ramah dan kerukunan Indonesia tiba-tiba saja menghilang. Bangsa-negara Indonesia seakan lupa akan arti dan penerapan *bhinneka tunggal ika* yang telah ratusan tahun ada. Kemajemukan bukan lagi modal dasar melangkah bersama. Tapi justru beban karena seluruh anak bangsa sibuk dengan diri mereka sendiri. Mengutamakan kepentingan bersama, kepentingan berbangsa dan bernegara, kepentingan yang lebih besar dari pada kepentingan pribadi kini ditiadakan. Chauvinisme menguat tanpa tanggung-tanggung. Dan rupanya keadaan tersebut sekali lagi digunakan oleh beberapa pihak untuk mendapatkan kepentingan. Proses integrasi bangsa membentur hambatan-hambatan. Seperti persaingan antar kelompok dalam hal ekonomi dan politik, kecurigaan daerah akan campur tangan pemerintah pusat yang nyatanya tidak ada pendistribusian kesejahteraan yang jelas, dan kelahiran kembali ormas berideologi garis keras dan fundamental, baik dalam arti sebenarnya maupun kiasan.³

Banyaknya konflik atas nama sentimen keagamaan yang muncul ke permukaan akhir-akhir ini, terlebih dalam ruang politik, menjadi tanda kemunduran kehidupan berbangsa dan bernegara. Di sisi yang lain, ini bisa saja berpeluang menjadi alat perekat agar sesama anak bangsa tidak disibukkan hanya masalah internal bangsa-negara Indonesia. Ada tugas yang lebih besar dan menunggu untuk diselesaikan. Kemandirian bangsa, globalisasi, dan nasib generasi mendatang adalah beban yang harus mulai dituntaskan dengan segera. Tulisan ini mencoba untuk menelaah Pendidikan Islam berbasis multikultural dan juga kontruksi Pancasila, sebagai bentuk refleksi atas apa yang tengah terjadi di dalam dunia pendidikan pada khususnya, dan melemahnya pancasila sebagai dasar negara pada umumnya.

PENDIDIKAN ISLAM BERBASIS MULTIKULTURAL

Pendidikan Islam Multikultural dalam rangka merangkai kembali persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia menjadi penting dilakukan. Mengingat kondisi dewasa ini yang mana hanya dengan sedikit pemantik emosi, kerusuhan berbasis SARA mudah menyebar. Pendidikan Islam Multikultural atau lebih tepatnya Pendidikan Islam berbasis multikultural dewasa ini menjadi kebutuhan bersama. Ali Maksum menjelaskan:

Kesadaran multikulturalitas masyarakat yang terdiri dari banyak suku dan beberapa agama, maka pencarian bentuk pendidikan alternatif diperlukan. Yaitu suatu bentuk pendidikan yang berusaha menjaga kebudayaan suatu masyarakat dan memindahkan kepada generasi selanjutnya, menumbuhkan tata nilai, memupuk persahabatan antara siswa yang beraneka ragam suku, ras, dan agama,

² Lihat artikel Jatim, "Telaah Fenomenologis Patrimonialisme Budaya Politik Terhadap Konflik Sunni-Syiah Madura", dalam Jurnal *Maraji*, vol 3 no 1 September 2016.

³ Eko Prasetyo dalam bukunya *Assalamu'alaikum: Islam itu Agama Perlawanan*, mencoba membedah gerakan Islam. Baik mahasiswa maupun ormas yang lain. Keberadaan ormas-ormas garis keras sampai komersialisasi agama di media. Semua itu pada satu sisi adalah implikasi logis dari adanya tuntutan liberasi pasar.

mengembangkan sikap saling memahami, serta mengerjakan keterbukaan dan dialog.⁴

H.A.R. Tilaar menggambarkan bila pergeseran multikultural di Indonesia adalah sebagai berikut, fase pertama adalah berbasis kepulauan nusantara berbasis Asia, Eropa, dan Arab. Adanya penentangan terhadap kolonialisme dan imperialisme. Kedua, multikultural berbasis globalisasi, demokratisasi, implementasi HAM, dan dampak teknologi informatika. Ketiga, multikultural masa depan, dimana dengan adanya keberagaman menjadi modal awal menata bangsa negara menjadi lebih baik.⁵

Pendidikan Islam berbasis multikultural perlu diterjemahkan kembali mengingat situasi yang beda. Pembaharuan ini bukan dalam rangka menghapus sejarah keragaman yang memang sudah ada di Islam dan Indonesia, namun semakin memperkokohnya sekaligus jawaban atas dialektika zaman yang menuntut manusia bergerak dinamis dan cepat. Globalisasi dewasa ini telah membuat batas-batas teritorial sebuah negara menjadi hilang. Atau katakanlah apa yang kemudian menjadikan sebuah bangsa berbeda dari bangsa lain tidak begitu signifikan. Batas kedaulatan tidak lagi memakai pendekatan fisik, kedaulatan ekonomi, budaya, bahasa, dan yang lain sebagainya seakan tidak memiliki arti lagi. Globalisasi dengan didukung teknologi informatika semakin mempersempit jarak, sekaligus membuat antara manusia Indonesia dan negara lain tidak jauh berbeda. Dalam parameter khusus tentunya.

Pendidikan Islam berbasis multikultural dengan demikian penting untuk dilakukan agar manusia Indonesia, khususnya umat Islam tidak menjadi katak dalam tempurung. Islam Indonesia berbicara dan berbuat demi sesuatu yang lebih besar dan humanis. Tidak mengatasnamakan teror dan kekerasan sebagai jalan akhir pemecahan masalah. Dan Islam Indonesia bisa *survive* dalam pergulatan dunia global.

Muhammad Tholhah Hasan menegaskan;

Kemajemukan merupakan ciri yang menonjol di Indonesia. Kemajemukan bangsa Indonesia dapat dilihat dari dua perspektif, yaitu: horizontal dan vertikal. Dalam perspektif horizontal, kemajemukan dapat dilihat dari keragaman agama, etnis, bahasa daerah, geografis, pakaian, makanan, dan budaya. Sementara dalam perspektif vertikal, kemajemukan bangsa ini dapat dilihat dari perbedaan tingkat pendidikan, ekonomi, pemukiman, pekerjaan, dan tingkat sosial budaya. Dari realitas kultur tersebut, memang pendidikan multikultural menjadi salah satu solusi yang perlu diperhatikan, termasuk pendidikan islam multikultural.⁶

Benyamin Molan menegaskan:

Maka, membangun masyarakat multikulturalistik harus juga dilakukan melalui pendidikan multikulturalisme. Orang yang hidup dalam masyarakat plural tidak hanya harus menjalani pendidikan yang mengembangkan sikap bebas, melainkan juga menghargai kesetaraan dan mengekspresikan kebebasan, tetapi dalam batas-batas kesetaraan. Pendidikan yang sesuai dengan itu adalah pendidikan karakter

⁴ Ali Maksum, *Pluralisme dan Multikulturalisme:Paradigma Baru Pendidikan Agama Islam di Indonesia*, (Malang:Aditya Media, 2011), 203

⁵ H.A.R. Tilaar, *Multikulturalisme:Tantangan-Tantangan Global Masa Depan dalam Transformasi Pendidikan Nasional*, Jakarta:Grasindo, 2004, xxx.

⁶ Muhammad Thochah Hasan, *Pendidikan Multikultural:Sebagai Opsi Penanggulangan Radikalisme*, (Malang:LP Unisma, 2016), 33.

yang ditunjang dengan pendidikan untuk bersikap kritis, pendidikan yang membuka wawasan, dan pendidikan etika. Pendidikan ini sebaiknya dilakukan sejak dini, mulai dari keluarga dan pendidikan dasar, dengan metode yang lebih banyak dimulai dari wilayah psikomotorik. Bila dilaksanakan di tingkatan lanjutan, pendidikan ini sebaiknya berangkat dari wilayah afektif. Atau bila dimulai pada tingkat perguruan tinggi, metode pendidikan ini sebaiknya lebih banyak bertumpu pada wilayah kognitif.⁷

Problem yang kemudian muncul tidak semata dalam tataran perdebatan akademik semata. Mengingat keragaman, atau keadaan yang multikultur adalah sebuah keniscayaan yang tidak dapat dihindari dari ingatan sejarah bangsa-negara Indonesia. Indonesia dengan demikian adalah sebuah anugerah besar yang harus dijaga dan dikembangkan. Agar ia tidak pupus oleh dialektika zaman. Pendidikan Islam Multikultural atau Pendidikan Islam berbasis multikultural, sekali lagi adalah Pendidikan Islam yang berbasis realita. Orientasi dari pendidikan multikultural tentulah untuk menjaga kebhinnekaan yang ada. Menjaga agar dalam NKRI tidak ada satu pihak pun yang merasa paling baik dan paling benar. Menjaga supaya semua warga negara mendapatkan hak beserta kewajiban sebagai implikasi logisnya.

Pendidikan Islam berbasis multikultural parameterinya tidak bisa dilepaskan dari dimensi akademis dan dimensi sosial. Dimensi akademis, dengan adanya proses pembelajaran dan pembiasaan yang kontinyu di lembaga pendidikan, tentu akan sangat mendorong siswa secara akademis mampu memahami arti keragaman dan kebersamaan dalam perbedaan. Terkait dimensi sosial, hari ini, umat Islam Indonesia lebih menyukai keseragaman. Keragaman, dalam hal berpikir, bertindak, dan berhaluan organisasi, bisa saja menimbulkan konflik. Antara umat seagama saja bila garis politiknya beda dapat berujung konflik pribadi yang tidak akan pernah bisa diketemukan.⁸ Apalagi keragaman dalam hal agama. Tentulah dibutuhkan konstruksi yang kokoh dan merangkul semua pihak agar kedamaian dapat tercipta. Orientasi dimensi sosial dari Pendidikan Islam berbasis Multikultural adalah terciptanya masyarakat yang harmonis meskipun berbeda agama, suku, bahasa, bahkan pilihan politiknya.

Ayzumardi Azra menjelaskan:

Menciptakan sebuah hubungan antar agama yang sehat dan penuh kedamaian di Indonesia akan sangat tergantung pada kemampuan dari tiap kelompok keagamaan untuk mendalami pemahaman mutual atas doktrin-doktrin dan praktek-praktek

⁷ Benyamin Molan, *Multikulturalisme: Cerdas membangun Hidup Bersama yang Stabil dan Dinamis*, (Jakarta: Indeks, 2015), 126.

⁸ Islam di Indonesia, dan juga pada kawasan Asia Tenggara, ditengarai masuk melalui tiga jalan. Yakni langsung dari Arab, India, dan China. Pendapat Husein Azmi yang dikutip kembali oleh Dedi Supriyadi menjelaskan bila, tiga teori kedatangan Islam ke tanah melayu yaitu: a. Teori Arab, yaitu datangnya Islam ke tanah Melayu secara langsung dari Arab, karena muslim wilayah Melayu berpegang teguh pada mazhab Syafi'i yang lahir di semenanjung Arab. Teori ini didukung oleh Sir John Crawford, b. Teori India, yakni Islam datang dari India. Teori ini lahir lepas tahun 1883, dibawa oleh C. Snouch Hurgronje, c. Teori China, yakni Islam datang ke wilayah Nusantara dari China. Teori ini dikemukakan oleh Emanuel Godinho de Eradie. Dedi Supriyadi, *Sejarah Peradaban Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2008), 197. Ini menunjukkan bila sebenarnya dari cara masuknya saja Islam sudah tidak seragam. Tidak mengherankan kemudian watak Islam Indonesia juga menjadi beragam pula.

kelompok keagamaan lain sebagai prioritas pertama. Pendalaman ini mencakup pengenalan kemajemukan di antara para pemeluk tiap agama dalam penafsiran mereka atas pelbagai aspek ajaran keagamaan. Lantas, pendalaman pemahaman atas agama lain itu diharapkan bahwa perilaku ini akan digunakan untuk membongkar, atau paling tidak mengurangi persepsi yang bersifat stereotip dan bias serta pandangan yang tidak akurat. Dan pada akhirnya akan menghasilkan sebuah rasa hormat dan toleransi yang mutual (saling menguntungkan) serta keberadaan yang penuh kedamaian.⁹

Kesenjangan yang ada dalam wilayah akademik dan sosial dengan demikian sebisa mungkin untuk dicari penyelesaiannya. Mengingat bahwa sangat tidak nyaman untuk terus berada dalam konflik internal, konflik dengan sesama anak bangsa. Sementara perubahan zaman dengan era komunikasi telah bergerak menjadi semakin jauh. Bangsa-Negara Indonesia telah tertinggal jauh dari yang lain dalam merespon liberalisasi global. Alih-alih mengejar, justru elit dan borjuasi nasional lebih memilih terjebak dalam konflik horisontal.

KONSTRUKSI SOSIAL PANCASILA

Keadaan anti toleran yang menguat pada sekitar awal 2000 ini terjadi bukan tanpa penyebab. Keadaan peta politik lokal, nasional, dan global turut mempengaruhinya. Masyarakat lokal (daerah) telah lama memendam rasa ketidakpuasan atas kebijakan-kebijakan yang diterapkan. Terlebih selama Orde Baru.¹⁰ Sebagian besar merasa dianaktirikan. Contohnya adalah Aceh dan Papua. Keduanya termasuk daerah yang berjasa dalam menambah devisa negara. Akan tetapi perlakuan dan kebijakan pemerintah pusat sama sekali kurang menyentuh keinginan dan harapan.

Situasi politik nasional juga dipenuhi oleh oligarki politik kelompok-kelompok yang menginginkan perubahan pemimpin. Tidak dapat dipungkiri, pernah terjadi penolakan atas terpilihnya kembali Presiden Soeharto dalam pemilu 1995. Selain Soeharto dipandang sangat militeristik, ia juga memiliki dosa kemanusiaan yang tidak sedikit. Ditambah ketidakberdayaan pemerintah menghadapi krisis ekonomi yang melanda beberapa negara, termasuk Indonesia. Krisis ini pada satu sisi juga karena pemerintah kesulitan mengembalikan hutang luar negeri.¹¹ Sehingga diperlukan wajah

⁹ Azyumardi Azra, "Eksplorasi atas Isu-Isu Kesenjangan dan Kemajemukan", dalam, Franz Magniz-Suseno dkk, *Memahami Hubungan antar Agama*, pent. Burhandin Dzikri, (Yogyakarta:ElShaq,tt) 131.

¹⁰ Relasi pusat dan daerah, sejak Indonesia merdeka mengalami dinamika yang beragam. Tidak dapat dipungkiri bila Ir. Soekarno melakukan beberapa kontrak politik dengan tokoh-tokoh yang dianggap penting di suatu daerah agar NKRI berdiri. Salah satunya dengan Aceh. Pergolakan sesama anak bangsa dalam masa kemerdekaan sering muncul. Karena ada beberapa pihak yang merasa kurang diperhatikan oleh pemerintah. Kemunculan DI/TII, Permesta, dan lain sebagainya. Hubungan yang kurang harmonis tersebut semakin melebar dan dalam ketika Orde Baru dengan kebijakan atau semboyan ekonomi sebagai panglima mengambil kendali pemerintahan. Gesekan-gesekan yang muncul menjadi lebih tajam karena pendekatan militeristik digunakan. Dan Soeharto sebagai tokoh militer sekaligus pemimpin Orde Baru menggunakan pendekatan tersebut untuk meredam gejolak yang menentang kebijakan pusat. Untuk lebih jelasnya bisa dibaca, Abdul Halim, *Politik Lokal: Pola, Aktor dan Alur Dramatisasinya (Perspektif Teori Powercube, modal dan Panggung)*, (Yogyakarta:LP2B, 2014), 193.

¹¹ Lynn H. Miller menulis bila, Rezim ekonomi internasional yang muncul setelah perang dunia II sebenarnya tidak secara persis mencurahkan perhatian untuk menangani persoalan-persoalan

baru yang lebih tangguh untuk memimpin bangsa-negara Indonesia. Belum lagi permasalahan terpinggirkannya partai politik dalam pemerintahan Orde baru, membuat kanalisasi di wilayah nasional semakin meruncing.¹²

Peta politik global juga berubah. Setelah kekalahan Rusia dalam perang dingin dengan Amerika menyebabkan dialektika antara kapitalisme dan sosialisme kini melebur menjadi satu. Mereka mencari musuh baru sebagai antitesa peradaban dan geliat Barat untuk berbenah. Barat memilih Islam sebagai lawan dengan mengangkat kembali isu-isu budaya sebagai pemicu konflik.¹³ Tidak hanya berhenti di situ, penciptaan istilah fundamental, teroris, dan stigma bila Islam adalah sebuah agama berbasis kekerasan mengalir deras ke dalam media.

Indonesia merupakan sebuah bangsa-negara dengan keadaan yang multikultur. Artinya memiliki banyak suku bangsa, bahasa, budaya, sampai agama dan aliran kepercayaan. Kondisi yang demikian memang telah ada semenjak ratusan tahun yang lalu. Keberagaman yang ada semakin kuat mengakar dengan dikukuhkannya Pancasila sebagai dasar negara.¹⁴

Ki Fudyatanta menjelaskan:

Sebagai akibat dari Pancasila menjadi dasar filsafat negara Republik Indonesia, maka menjadi sistem kenegaraan atau sistem pemerintahan Indonesia mengindetintas Pancasila. Dan subsistem-subsistem kehidupan kenegaraan Indonesia wajib dijiwai oleh Pancasila pula. Adapun yang dimaksud dengan sub sistem kenegaraan akan meliputi bidang-bidang ideologi politik, hukum, ekonomi, sosial, seni-budaya, pertahanan dan keamanan, ilmu dan teknologi, pendidikan, sampai juga pada hidup keagamaan dan alam kepercayaan bangsa

yang dihadapi oleh apa yang kemudian disebut sebagai negara dunia ketiga, dengan warisan kemiskinan dan kurangnya perkembangan serta dampak ikutannya yang berupa kesenjangan yang kian melebar dari kesejahteraan hidup diantara penduduknya yang luar biasa besar dengan kondisi negara utara yang trus menumpuk kekayaannya. Tetapi sebaliknya, sistem internasional tersebut dibangun diatas beberapa asumsi umum, seringkali lebih tersirat daripada tersurat, agar selaras dengan anjuran-anjuran liberalisme, *laissez faire*. Lynn H. Miller, *Agenda Politik Internasional*, Pent. Daryatno, (Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 2006), 314-315.

¹² Pada tahun 1980n bermunculan gerakan-gerakan dakwah di kampus yang merupakan alternatif gerakan di bidang politik. Juga LSM sebagai bentuk kontrol terhadap pemerintahan. Gerakan komando dakwah dalam masa Orde Baru dianggap sebagai penyambung gerakan kelompok radikal Islam. Lihat Kuntowijoyo, "Transformasi Kehidupan Agama dan Organisasi Islam", dalam Kuntowijoyo, *Paradigma Islam: Interpretasi untuk Aksi*, ed. AE Priyatno, (Sleman:Tiara Wacana, cet.1, 2016), 66-67.

¹³ Gema Martin Munoz, "Islam dan Barat: Sebuah Dualitas Internasional", dalam, John L. Esposito et.al, *Dialektika Peradaban: Modernisme Politik dan Budaya di Akhir Abad ke-20*, (Yogyakarta: Qalam, 2002), 3.

¹⁴ Perumusan Pancasila sebagai ideologi bangsa-negara Indonesia secara resmi diperkenalkan dalam sidang *Dokuritsu Zyumbi Tyoosakai*, beberapa tokoh mengajukan tawaran sebagai bahan mentah untuk menyusun ideologi pemersatu bangsa-negara Indonesia. Ir. Soekarno juga mengajukan lima dasar dari sebuah rangkaian nilai ideologi yang kemudian dikenal dengan Pancasila. Soekarno, "Lahirnya Pancasila: Pidato Pertama tentang Pancasila, 1 Juni 1945", dalam, *Bung Karno Menggali Pancasila*, peny. Wahyu Tunggal Alam, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2001), 1-34.

Indonesia. Hal ini berarti, bahwa jika ditinjau dari unsur-unsur umum kebudayaan, semuanya dijiwai oleh Pancasila.¹⁵

Pancasila sebagai ideologi bangsa-negara Indonesia, merupakan hasil dialektika antara nilai-nilai kearifan yang terserak dari Sabang sampai Merauke dengan berbagai ideologi yang berkembang pada waktu tersebut. Ada Sosialisme, Humanisme, Nasionalisme, yang memberikan corak dalam memperkokoh atau mewarnai Pancasila. Lima sila dalam Pancasila tidak bisa berdiri sendiri. Ia utuh dan menunggal. Karenanya memahami Pancasila kurang sempurna apabila menonjolkan salah satu sila saja.

Pancasila sebagai ideologi, berfungsi juga seperti sebuah ikat yang menjaga seluruh elemen anak bangsa untuk tercerai berai. Kesemuanya sebisa mungkin diakomodir, tanpa ada salah satu pihak yang dilemahkan, diperkecil, bahkan ditindas. Sebagaimana termaktub dalam alenia empat Pembukaan UUD 45 yang berbunyi, “Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial...”

Pancasila dengan segala turunannya dengan demikian dibutuhkan tidak semata dalam tataran wacana akademik belaka. Pada kehidupan berbangsa dan bernegara, penerapan Pancasila harus termanifestasikan. Pancasila mendarah daging, mewujud pada perilaku yang pancasilais.

Pancasila hanya akan menjadi sebuah ideologi yang dihafal belaka apabila bangsa-negara Indonesia tidak pernah mewujudkannya dalam perilaku sehari-hari. Dalam menghadapi dialektika era komunikasi, penerapan Pancasila membutuhkan campur tangan beberapa pihak. Agar Pancasila menjadi sesuatu yang wajar, dan kebutuhan akan identitas jati diri bangsa Indonesia. Pada saat inilah proses konstruksi sosial dalam rangka penanaman Pancasila tidak boleh berhenti.¹⁶

Konstruksi sosial Pancasila dipandang perlu mengingat dari dalam bangsa-negara Indonesia, ujian dan tantangan datang silih berganti. Permasalahan SARA, konflik antar elit politik, kesenjangan pusat dan daerah, dan konflik baik horizontal maupun vertikal membutuhkan penyelesaian yang tidak taktis. Ancaman hilangnya identitas sebuah bangsa-negara dalam era komunikasi sudah semakin jelas terbaca. Ketika akses informasi mudah menjangkau siapapun, tentulah kedaulatan budaya, bahasa, mulai memudar. Dan yang lebih mengkhawatirkan lagi adalah terkikisnya nilai-nilai Pancasila, sudah diambang mata.

¹⁵ Ki Fudyatanta, *Filsafat Pendidikan Barat dan Filsafat Pendidikan Pancasila: Wawasan Secara Sistematis*, (Yogyakarta: Amus, 2006), 168.

¹⁶ Konstruksi sosial merupakan istilah dalam sosiologi pengetahuan yang dikembangkan oleh Peter L. Berger, lihat Peter L. Berger dan Thomas Luckmann, *Tafsir Sosial atas Kenyataan: Risalah tentang Sosiologi Pengetahuan*, pent. Hasan Basari, (Jakarta: LP3S, cet.10, 2013), 4. Bisa jadi pula meminjam istilah Gramsci, dibutuhkan intelektual organik dalam proses konstruksi sosial Pancasila.

SIMPULAN

Pendidikan Islam berbasis multikultur di Indonesia menjadi sebuah gagasan alternatif di tengah kondisi bangsa yang sedemikian kompleks. Tidak dapat dipungkiri, Islam turut menyumbangkan jasanya dalam perjalanan bangsa-negara Indonesia. Seperti pada masa kemerdekaan, Orde Lama, sampai Orde Baru. Pendidikan Islam berbasis multikultur pada satu sisi memberikan pemahaman kepada umat Islam bahwa sebenarnya Islam sendiri menghargai perbedaan. Entah itu suku, agama, gender, strata sosial, sampai kepada pilihan politik. Orientasi dari Pendidikan Islam berbasis multikultur adalah adanya cara pandang yang lebih bijak dan sejuk dari umat Islam di dalam menyikapi perbedaan. Khususnya kebhinnekaan di Indonesia. Dan umumnya ikut menjaga perdamaian dunia.

Konstruksi sosial Pancasila sebagai ideologi bangsa-negara Indonesia, dengan melibatkan beberapa pihak dipandang perlu. Indonesia menghadapi dua tantangan yang harus dijawab dengan cepat. Pergolakan sesama anak bangsa, serta problem dialektika zaman informatika. Jika proses konstruksi sosial tersebut tidak dilakukan, maka identitas bangsa-negara Indonesia akan memudar secara perlahan. Dan Pancasila tidak lebih dari sekedar hafalan-hafalan pelajar sekolah dasar. □

DAFTAR PUSTAKA

- Azra, Azyumardi, 2011. *Merawat kemajemukan Merawat Indonesia*, Yogyakarta:Kanisius, cet. 5,
- Franz Magniz-Suseno dkk, *Memahami Hubungan antar Agama*, pent. Burhanudin Dzikri, Yogyakarta:ElShaq,tt.
- Halim, Abdul, 2014, *Politik Lokal:Pola, Aktor dan Alur Dramatikalnya (Perspektif Teori Powercube, modal dan Panggung)*, Yogyakarta:LP2B.
- H. Miller, Lynn, 2006, *Agenda Politik Internasional*, Pent. Daryatno, Yogyakarta:Pustaka Pelajar.
- John L. Esposito et.al, 2002, *Dialektika Peradaban:Modernisme Politik dan Budaya di Akhir Abad ke-20*, Yogyakarta:Qalam.
- Ki Fudyatanta, 2006, *Filsafat Pendidikan Barat dan Filsafat Pendidikan Pancasila:Wawasan Secara Sistematis*, Yogyakarta:Amus.
- Kuntowijoyo, 2016, *Paradigma Islam:Interpretasi untuk Aksi*,ed. AE Priyatno, Sleman:Tiara Wacana, cet.1.
- L. Berger, Peter, 2013, dan Thomas Luckmann, *Tafsir Sosial atas Kenyataan:Risalah tentang Sosiologi Pengetahuan*, pent. Hasan Basari, Jakarta:LP3S, cet.10.
- Molan, Benyamin, 2015, *Multikulturalisme:Cerdas membangun Hidup Bersama yang Stabil dan Dinamis*, Jakarta:Indeks,
- Supriyadi, Dedi, 2008, *Sejarah Peradaban Islam*, Bandung: Pustaka Setia.
- Thochah Hasan, 2016, Muhammad, *Pendidikan Multikultural:Sebagai Opsi Penanggulangan Radikalisme*, Malang:LP Unisma,
- Tilaar, H.A.R., 2004. *Multikulturalisme:Tantangan-Tantangan Global Masa Depan dalam Transformasi Pendidikan Nasional*, Jakarta:Grasindo.
- Tunggul Alam, Wahyu, peny. 2001, *Bung Karno Menggali Pancasila*, Jakarta:Gramedia Pustaka Utama.